

## Pelatihan Perancangan Sop Pengelolaan Dana Dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada UPTD Balai Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat

Riani Sukma Wijaya\*<sup>1</sup>, Ratnawati Rafli<sup>2</sup>, Murniati<sup>3</sup>, Eka Mariyanti<sup>4</sup>, Enny Arita<sup>5</sup>

Universitas Dharma Andalas

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas

\*e-mail: rianisukmawijaya@unidha.ac.id

### Abstract

*This community service activity is aimed at cooperative managers who still lack an understanding of creating cooperative financial reports in accordance with the PSAK ETAP (Indonesian Financial Accounting Standards for Small and Medium Enterprises). The activity is conducted at the Cooperative Technical Implementation Unit (UPTD) and involves the participation of 40 cooperative managers from various regions in West Sumatra. In this regard, their knowledge and ability to prepare cooperative financial reports are limited. There is a lack of an effective accounting information system as a basis for accurate financial reporting, and insufficient control over cooperative operational activities. As a result, the presentation of financial reports serves as a performance report for managers or a report of cooperative management accountability. The method designed for this activity starts with providing practical experience in creating financial reports and establishing Cooperative Financial Recording Standard Operating Procedures (SOP) using flowcharts. With the implementation of this training, cooperative managers will be capable of creating Cooperative Financial Reports and designing cooperative SOPs that align with the needs of the cooperatives they manage.*

**Keywords:** Accounting for SMEs, SAK ETAP (Indonesian Financial Accounting Standards for Small and Medium Enterprises), SOP (Standard Operating Procedures), Financial Reports

### Abstrak

Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada pengelola Koperasi yang masih belum memahami membuat laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan PSAK ETAP. Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Koperasi dengan menghadirkan 40 orang pengelola koperasi dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat. Dalam hal ini mereka masih terbatas dalam pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan koperasi, ketiadaan sistem informasi akuntansi yang efektif sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, dan kurangnya pengendalian dalam kegiatan operasional koperasi sehingga tersajinya laporan keuangan sebagai bentuk laporan kinerja pengelola atau laporan pertanggungjawaban pengelola koperasi. Metode yang dirancang dalam kegiatan ini dimulai dari memberikan praktik pembuatan laporan keuangan dan pembuatan SOP Pencatatan keuangan Koperasi dengan menggunakan Flowchart. Dengan adanya pelatihan ini, pengelola koperasi sudah bisa membuat laporan keuangan Koperasi dan Merancang SOP koperasi yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi yang mereka kelola.

**Kata kunci:** Akuntansi UMKM, SAK ETAP, SOP, Laporan Keuangan

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



### 1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya (Nurdita, 2012).

Keterbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan PSAK, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya bading yang tinggi serta berstandar. Sebaliknya jika laporan keuangan koperasi disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, dapat menyesatkan penggunaannya (Putro, 2013).

Di Indonesia sendiri telah dibuat standar akuntansi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaku koperasi, yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK ETAP tersebut telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditunjukkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (Rudiantoro dan Siregar, 2012).

SAK ETAP berlaku juga bagi koperasi yang notabene entitas kecil yang semula menggunakan Standar Akuntansi Koperasi menjadi SAK ETAP ( *Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04 / per / m.kukm / vii / 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi* ) :

“Laporan keuangan koperasi menyajikan beberapa informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Pedoman ini adalah merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya, yang berisi praktek penerapan akuntansi pada entitas koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan internasional ( *International Financial Reporting Standard / IFRS* ). Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 ( PPSAK 8 ) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 ( PSAK 27 ). Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi dua, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum ( SAK Umum ). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. Maksud dan tujuan pedoman akuntansi adalah untuk menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga dapat membantu mempercepat tugas pengurus dalam upaya menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun tujuan - tujuan lain.”

Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor : 200/ SE / Dept.1 / XII / 2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan dengan perberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks, perbedaan dengan

PSAK No. 27 tahun 1998 tidak ada kewajiban Koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

Laporan keuangan koperasi yang berstandarkan SAK ETAP yaitu meliputi penyusunan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan ([www.diskopjatim.go.id](http://www.diskopjatim.go.id)).

Hambatan yang masih sering terjadi koperasi Indonesia yaitu permodalan. Para pelaku koperasi merasakan berkurangnya jumlah investor. Hal ini disebabkan karena kekurangan dalam hal pelaporan keuangan yang dibuat oleh para pelaku koperasi sehingga membuat investor menjadi ragu dalam menanamkan modal mereka. Disahkannya SAK ETAP oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009, dan mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2011, menjawab kesulitan pada para pelaku koperasi dalam menyusun laporan keuangan mereka agar menjadi suatu pelaporan keuangan yang efektif. SAK ETAP menawarkan cara penyusunan pelaporan keuangan yang efektif namun juga tidak serumit SAK Umum, sehingga mempermudah manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi usaha ke depan (Azaria, 2013).

Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya (Auliyah dalam Azaria, 2013). Tujuan SAK ETAP sendiri yakni memberikan kemudahan bagi entitas seperti koperasi. SAK yang berbasis IFRS (SAK umum) ditunjukkan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. Sehingga, rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas koperasi. Beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Selain itu, koperasi juga mengacu kepada Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang diterbitkan oleh Kantor Menegkop dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2001. Pedoman umum yang dimaksud diterjemahkan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1998 dan diperbaharui pada tahun 2002. Oleh karena itu, Pedoman Umum PSAK No. 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Akuntansi KJKS dan UJKS Koperasi ini. Pedoman umum mengarahkan agar akuntansi koperasi dilaksanakan berdasarkan nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi dan proses akuntansi KJKS dan UJKS Koperasi harus sejalan dengan pedoman tersebut, disesuaikan dengan karakteristik KJKS dan UJKS Koperasi. Selain itu, Akuntansi untuk KJKS dan UJKS Koperasi juga berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada pengelola Koperasi yang masih belum memahami membuat laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan PSAK ETAP. Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Koperasi dengan menghadirkan 40 orang pengelola koperasi dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat.

Dalam hal ini mereka masih terbatas dalam pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan koperasi, ketiadaan sistem informasi akuntansi yang efektif sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, dan kurangnya pengendalian dalam kegiatan operasional koperasi yang di tuangkan dalam SOP sehingga tersajinya laporan keuangan sebagai bentuk laporan kinerja pengelola atau laporan pertanggungjawaban pengelola koperasi. Metode yang digunakan dengan memberikan pelatihan penyusunan SOP serta membuat laporan keuangan dengan benar sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu membuat SOP yang ada di Koperasi sehingga jelas alur pengendalian internal dan pengambilan keputusan dengan benar.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN ← Cambria, Bold, 11 pt**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2023 di UPTD Balai Pendidikan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat yang di mulai jam 08.00 sampai dengan 12.00 WIB, Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 40 orang pengelola Koperasi baik yang berasal dari Padang maupun di luar Padang.

1. Metode Pelatihan pertama yang dipilih adalah Ceramah, diskusi dan kasus terkait pentingnya pengelolaan keuangan koperasi. Pengelolaan Keuangan yang transparansi dan akurat akan menghasilkan laporan yang dapat di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja koperasi. Peserta di berikan materi dalam bentuk pengenalan terhadap SAK ETAP dan Laporan keuangan Koperasi berdasarkan SAK ETAP . Selanjutnya untuk menjamin adanya

konsistensi dan keteraturan dalam pengelolaan koperasi maka di perlukan SOP yang jelas dan detail.

2. Materi berikutnya yang diberikan adalah Pengenalan terhadap berbagai SOP penyusunan Laporan Keuangan Koperasi yaitu: Dasar Penyusunan Keseimbangan Arus Dana, standar penggunaan kelebihan dana, dan standar penyusunan laporan keuangan.
3. Metode Pelatihan yang ketiga di lakukan dalam bentuk evaluasi terkait SOP maupun laporan keuangan yang telah di miliki oleh koperasi masing masing peserta agar memudahkan mengetahui kendala yang di hadapi oleh masing masing peserta dalam meneratkan SAK ETAP dan Menyusun SOP Koperasi

#### Tabel dan Gambar



Gambar 1. Pelatihan Penyusunan SOP, Laporan Keuangan

#### 4. KESIMPULAN

Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang di inisiasi oleh UPTD Balai Pendidikan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat ini dapat membantu pengelola koperasi memahami ketentuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP Lebih lanjut Peserta di perkenalkan dan di berikan bimbingan terkait Komponen Laporan Keuangan yang harus disajikan menurut ketentuan SAK ETAP. Koperasi harus menyajikan Laporan keuangan meliputi: Laporan Posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas.

Dari hasil pelatihan juga di dapatkan gambaran bahwa koperasi pada dasarnya telah menyiapkan laporan keuangan. Hanya dari hasil diskusi ternyata laporan keuangan yang di buat belum lengkap dan bahkan belum sesuai dengan SAK ETAP. Dan untuk ini di perlukan bimbingan lebih lanjut agar pengelola koperasi bisa memperbaiki laporannya.

Hal tak kalah penting yang berikutnya dalam mengelola koperasi di perlukan aturan yang jelas pengelolaan dilakukan dengan cara terstruktur, transparansi, akuntabel. Dan untuk itu koperasi harus memiliki SOP yang terdiri dari SOP Penyusunan Keseimbangan Arus Dana, SOP Penggunaan Kelebihan Arus Dana dan SOP Penyusunan Laporan Keuangan. Sehingga terjasi konsistensi dan juga memperlihatkan komitmen yang kuat dari pengelola dalam menjalankan amanah para anggota koperasi agar dapat memakmurkan anggota koperasi pada akhirnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 342. <http://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2506>
- Kurniawan. (2020). Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ( Studi pada UMKM Raja Eskrim ) di Kota Kediri. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2). <http://doi.org/10.26905/ap.v6i2.4570>
- Legina, X., & Sofia, I. P. (2020). Pemanfaatan Software Pembukuan Akuntansi sebagai solusi atas sistem Pembukuan Manual Pada UMKM *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 172. <http://doi.org/10.31851/neraca.v4i2.4771>
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <http://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Rinandiyana, L. R., Kusnandar, D. L., & Rosyadi, A. (2020). Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android (SIAPIK) untuk Meningkatkan Administrasi Keuangan UMKM. *QARDHUL HASAN: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 73. <http://doi.org/10.30997/qh.v6i1.2042>
- SAK, E. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia*, (4), 2017-2019. Retrieved from [http://russellbedford.co.id/foto/Newsletter Russell Bedford SBR Edisi No. 4, 2017.pdf](http://russellbedford.co.id/foto/Newsletter%20Russell%20Bedford%20SBR%20Edisi%20No.%204,%202017.pdf)